

SOSIAL

NASKAH PUBLIKASI
PENELITIAN KEMITRAAN



GLOBALISASI EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
MENINGKATNYA ANCAMAN KEAMANAN TRADISIONAL

*Economic Globalization and its Impact on the Increasing of
Traditional Security Threat*

Oleh:

Muhammad Faris Al Fadhat, S.IP., M.A.

NIK: 163 126

Diajukan untuk memperoleh dana Penelitian LP3M
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tahun Anggaran 2012/2013

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

GLOBALISASI EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MENINGKATNYA ANCAMAN KEAMANAN TRADISIONAL

Economic Globalization and its Impact on the Increasing of Traditional Security Threat

Abstract:

After the end of the Cold War, globalization provides an equal opportunity for each country to experience the economic growth and perform a stable international political relationship. These circumstances, in the way of democratic perspective and liberal theory, will not only create a prosperous and well developed society but also support a peaceful coexistence among nations. Nevertheless, globalization that very much characterized by economic interdependence among states as well as trade cooperation also creates contradictions that should be anticipated. This research contends that globalization spawned alarming contradiction especially through the tensions of political economy cooperation, which in turn encourages a potential of greater conflict. This argument can be analyzed from two conditions: First, the economic growth tends to increase the potential arms race, which take place through two patterns (a) countries with promising economic growth will trying to match its economic growth by increasing its defense budget, as well as to ensure the security of its industries. In other words, countries with significant economic growth tend to increase its military budget for national security reasons; (b) the tendency of countries to demonstrate their supremacy in international politics arena. Second, the progress of global economy encourages the massive development of arms industries all over the world, not only expanded by both developed and developing countries but also enlarged by new actors such as Multi National Corporations.

Keywords: *Globalization, economic growth, arms race, conflict, traditional security threat*

Pendahuluan

Sejak berakhirnya Perang Dingin, beberapa teoritisi mencoba menjelaskan perubahan yang terjadi dalam politik internasional. Mulai dari kemenangan ideologi liberalisme dan demokrasi, sebagaimana tesis Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and the Last Man*,¹ hingga tawaran Samuel Huntington melalui gagasan besar *The Clash of Civilizations*, yang memunculkan *image* gelap dari pembagian umat manusia berdasarkan budaya, agama, dan ikatan sejarah, yang pada akhirnya, menurut Huntington, akan mendorong konflik antara kelompok-kelompok berbeda tersebut di abad 21.²

¹ Francis Fukuyama. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Penguin Books.

² Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.

Salah satu penjelasan yang cukup cermat dalam memahami perubahan politik global sejak berakhirnya Perang Dingin adalah globalisasi ekonomi. Hal ini tampak jelas dalam beberapa fenomena yang terjadi di sebagian belahan dunia: misalnya, bagaimana upaya transisi menuju sistem ekonomi kapitalis begitu semarak terjadi di negara-negara komunis di Eropa Timur, bekas Uni Soviet, serta Cina. Begitu juga meningkatnya organisasi internasional (yang didorong motif kerjasama ekonomi) baik secara kuantitas maupun kualitas: menguatnya komunitas Eropa (sekarang European Union) yang berawal dari "EU-1992" dan beranggotakan negara-negara di bagian Eropa Barat, serta terbentuknya North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan Mercosur di Amerika Selatan. Pada periode ini kita juga melihat mulai menguatnya rezim ekonomi (neoliberal) dunia dengan bertransformasinya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) menjadi World Trade Organization (WTO).

Fenomena ini, oleh sebagian kalangan, dipandang sebagai salah satu capaian positif yang akan membawa masa depan dunia yang lebih stabil. Pendapat semacam ini juga diamini oleh para penganut teori *democratic peace* dan *economic interdependence*, yang melihat persebaran ide demokrasi liberal serta kemajuan dan keterhubungan ekonomi global berdampak positif terhadap menguatnya perdamaian dunia. Selain itu pendapat kelompok ini juga turut diperkuat oleh beberapa aspek globalisasi itu sendiri yang mencoba menggeser pemahaman selama ini akan ancaman yang dihadapi umat manusia.

Di satu sisi, kolaborasi dari aspek-aspek globalisasi seperti saling keterhubungan, saling ketergantungan, saling penetrasi, dan kemajuan teknologi informasi, memberikan pengaruh besar dalam memaknai ancaman dan keamanan. Kemajuan teknologi informasi, misalnya, memaparkan fakta-fakta yang sebelumnya tidak terekspos, bahwa ancaman terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini tidak lagi dalam bentuk konflik antara negara atau perang terbuka, melainkan konflik-konflik kecil yang melibatkan etnis dan agama, ataupun pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim otoriter, meningkatnya kemiskinan, serta ancaman lingkungan. Persewaan persoalan yang tidak terkait secara langsung dengan kedaulatan negara

inilah yang lebih banyak dihadapi manusia, bahkan memakan korban jiwa jauh lebih besar daripada konflik antara negara.³

Karena itu geliat globalisasi yang begitu kencang tampaknya akan mendorong besarnya perhatian negara bangsa terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi serta upaya membangun kehidupan yang lebih baik melalui penyelesaian persoalan-persoalan keamanan manusia (*human security*), alih-alih memunculkan konflik terbuka yang lebih besar, sebagaimana yang pernah terjadi di era Perang Dingin dan sebelumnya.

Namun demikian, globalisasi ekonomi, di sisi lain, sejatinya melahirkan kontradiksi yang cukup mengkhawatirkan di dalam dirinya sendiri, terutama melalui ketegangan-ketegangan ekonomi-politik yang hadir dari relasi dan proses kerjasama ekonomi antara negara, yang justru bertolak belakang dengan asumsi-asumsi kelompok liberal selama ini. Salah satu aspek yang cukup penting dari globalisasi ekonomi adalah meningkatnya kerjasama ekonomi secara global, terutama melalui peningkatan pertukaran barang dan jasa. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kemajuan di sektor ekonomi. Bisa dibayangkan globalisasi menawarkan kesempatan bagi kemajuan ekonomi bagi setiap negara, dan hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah negara-negara yang geliat ekonominya cukup menjanjikan, terutama berasal dari negara-negara berkembang. Pada titik inilah justru jejak ketegangan ekonomi-politik muncul, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan konflik terbuka yang lebih besar. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dua proses: Pertama, kemajuan ekonomi yang dicapai sebuah negara justru semakin meningkatkan perlombaan senjata dalam politik internasional. Hal ini terjadi melalui dua pola: (a) negara-negara dengan ekonomi maju berusaha mengimbangi kemajuan ekonominya dengan meningkatkan anggaran pertahanannya, sekaligus untuk menjamin keamanan bagi industri-industrinya. Dengan kata lain, negara yang mengalami kemajuan ekonomi secara signifikan cenderung meningkatkan anggaran militernya; (b) adanya kecenderungan negara dengan ekonomi maju untuk menunjukkan supremasinya di dunia internasional.

Kedua, kemajuan ekonomi global memberikan kesempatan bagi berkembangnya industri-industri senjata yang tidak hanya dipelopori oleh negara

³ Lihat Barry Buzan. 1991. *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Manchester: Manchester University Press, hal. 21-22.

tetapi juga aktor-aktor baru seperti MNCs. Munculnya aktor-aktor baru dalam mengembangkan senjata ini, di satu sisi turut meningkatkan volume industri senjata secara global, sementara di sisi lain terlibat dalam kebijakan keamanan, terutama dengan kemampuannya mempengaruhi kebijakan keamanan sebuah negara. Selain itu, persebaran teknologi senjata kini mulai merata. Jika dulu hanya didominasi oleh negara-negara maju, maka kini negara-negara berkembang pun mulai mampu memproduksi senjata sendiri. Hal ini dikarenakan globalisasi memberi kesempatan bagi transfer teknologi serta meningkatnya kemampuan ekonomi di beberapa negara berkembang. Karena itu, alih-alih memberikan dampak positif bagi berkurangnya ancaman, sebagaimana tesis kaum liberal, globalisasi di sisi lain justru menyediakan ketegangan-ketegangan politik yang berpotensi memperluas eskalasi konflik antar negara.

Tulisan ini berusaha mengelaborasi secara kritis bagaimana globalisasi ekonomi tidak hanya memberikan dampak pada meningkatnya perhatian akan kesejahteraan dan ancaman-ancaman keamanan *non-traditional*, tetapi justru memberikan ruang bagi meningkatnya potensi ancaman konflik terbuka, terutama melalui *trend* perlombaan senjata.

Globalisasi dan Konsep Mengenai Keamanan

Globalisasi begitu terintegrasi dalam kehidupan manusia dalam aspek yang begitu luas, termasuk dalam hal ini dimensi politik, social, budaya, dan lainnya. Namun dimensi ekonomi dan teknologi menjadi cukup penting dalam menjelaskan dampak globalisasi dalam kehidupan manusia, termasuk sektor yang selama ini secara tradisional sedikit terisolir: keamanan.⁴

Dimensi ekonomi dari globalisasi mungkin paling baik disimbolkan dengan ekspansi produksi, investasi, dan perdagangan, baik oleh negara ataupun aktor non-negara (yang saat ini memang sangat dominan) seperti Multi National Corporation (MNCs) ke negara-negara lain. Saat ini globalisasi ekonomi mendorong peningkatan transaksi perdagangan global dengan sangat signifikan. Menurut WTO, ekspor barang dunia meningkat dua kali lipat dari 1.8 trilyun dolar AS di tahun 1983 menjadi 3.7 trilyun dolar tahun 1993, meningkat lagi dua kali lipat menjadi 7.4

⁴ Terrence R. Guay. 2007. *Globalization and Its Implications for the Defense Industrial Base*. (Online) (http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/07_01_07755.pdf diakses 5 Mei 2017)

trilyun dolar tahun 2003, dan meningkat 10.2 trilyun tahun 2005.⁵ Dan yang perlu dicatat adalah, keterbukaan dan keterhubungan yang menjadi karakter dari globalisasi memberi kesempatan kompetitif kepada siapa saja. Karena itu kini perdagangan dan kemajuan ekonomi tidak lagi didominasi oleh negara-negara maju. Negara-negara berkembang seperti India, Cina, Brazil, ataupun Indonesia mampu menikmati manfaat secara ekonomi.

Sementara itu kemajuan dan persebaran teknologi yang kini bisa dinikmati oleh sebagian besar negara di dunia membawa dampak positif bagi distribusi kekayaan. Dalam buku *best-seller*-nya yang terbit tahun 2005, *The World is Flat*, Thomas Friedman menjelaskan bagaimana revolusi teknologi informasi telah mereduksi (bahkan mungkin mendatarkan) keuntungan dari negara-negara maju (*industrialized*).⁶ Dengan memanfaatkan koneksi internet untuk *plug* dan *play*, misalnya, para pekerja yang cerdas dan terdidik di India dan Cina menikmati keuntungan besar dalam transaksi ekonomi global.

Dua dimensi penting globalisasi—kemajuan ekonomi dan teknologi—sangat penting dalam melihat dampak globalisasi terhadap keamanan, terutama bagaimana peran negara menguat kembali sebagai aktor dalam politik internasional, khususnya dalam hal keamanan. Jika selama ini konsepsi keamanan sudah bergeser ke arah pemahaman *non-traditional security*, di mana negara tidak lagi dianggap sebagai aktor dominan serta meluasnya sektor ancaman di luar konflik terbuka antar negara seperti ekonomi, lingkungan, dan kejahatan kemanusiaan, maka dengan meningkatnya kemajuan ekonomi yang dimungkinkan oleh globalisasi di mana distribusi kekayaan yang semakin meluas dan meningkatkan jumlah negara-negara dengan capaian kesejahteraan ekonomi, semakin menarik perhatian kepada *traditional security*.

Hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi tidak hanya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan sebuah negara, tetapi sekaligus turut mendorong meningkatnya kemampuan negara-negara tersebut di luar sector ekonomi, yakni pertahanan, yang kekuatannya menjangkau luar batas kedaulatan. Implikasinya pun

⁵ World Trade Organization. "Selected Long-Term Trends." *International Trade Statistics 2005*. (Online), (www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_e/its06_longterm_e.pdf diakses 10 Juni 2013).

⁶ Thomas L. Friedman. 2005. *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.

menjadi tidak sederhana, karena sekaligus malahirkan potensi ancaman konflik terbuka. Hal ini dimungkinkan melalui dua hal: Pertama, kemajuan ekonomi yang dicapai oleh satu negara akan mendorong negara tersebut untuk semakin memperluas kemampuan pertahannya dengan meningkatkan anggaran keamanan dan jumlah persenjataan; Kedua, persebaran kekayaan ekonomi serta kemajuan teknologi turut mendorong negara-negara memperkuat industri keamanan dalam negeri. Dua hal ini tak pelak turut meningkatkan potensi persaingan antar Negara, baik di kawasan maupun internasional, yang bisa mengarah pada kemungkinan adanya konflik terbuka.

Kemajuan Ekonomi dan Keamanan Tradisional

Dalam studi Hubungan Internasional, pertanyaan tentang *keamanan* mendapat perhatian cukup penting. Mengingat peradaban umat manusia abad modern dibangun di atas sejarah yang erat kaitannya dengan konflik terbuka dan perlombaan senjata. Perspektif realis, yang mendominasi studi hubungan internasional di abad dua puluh, cukup berjasa dalam mengembangkan studi keamanan. Keamanan internasional, menurut perspektif ini, merupakan hasil dari perselisihan antar negara yang saling bersaing dalam mencapai kepentingannya di lingkungan internasional yang *anarki*—sebuah kondisi di mana tidak adanya kekuatan yang lebih tinggi selain negara, serta kekuatan yang mampu memaksa terciptanya perdamaian antara negara berdaulat. Pada awalnya perspektif ini memiliki perhatian yang terbilang kecil dalam melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemungkinan konflik terbuka (baca: perang). Namun kini beberapa pemikir mencoba mengembangkan bagian teori yang bisa mengakomodir dan melihat kehidupan ekonomi mampu memberikan pengaruh signifikan bagi hubungan keamanan.

Bagian ini akan mencoba melihat secara teoritis dampak globalisasi, terutama aspek kemajuan ekonomi, terhadap hubungan keamanan: (a) teori yang menitik beratkan pada analisa karakteristik dan tren ekonomi nasional sebuah negara yang berdampak pada kepentingan dan kemampuannya; (b) teori yang melihat perbandingan dari karakter ekonomi dua atau lebih negara, atau hubungan kerjasama ekonomi antara keduanya untuk menjelaskan hubungan keamanan

Pertama, hipotesis yang dikemukakan Geoffrey Blainey mengenai “*war chest*”, bahwa negara yang semakin maju secara ekonomi akan cenderung meningkatkan belanja militernya seiring waktu, dan peningkatan kemampuan militer dan persenjataan tersebut akan membentuk *mind-set* yang akan mendorong para pemimpin negara untuk menggunakan potensi dan kekuatan yang diakumulasi selama ini. Karena itu, ketika sebuah negara berada dalam kondisi potensi perang yang semakin besar, maka semakin kuat upaya negara tersebut untuk terlibat dalam konflik senjata.⁷

Teori yang juga cukup baik menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan kecenderungan konflik senjata adalah teori *Lateral Pressure* yang dikemukakan Nazli Courcri dan Robert C. North.⁸ Kedua penulis ini secara eksplisit fokus pada pertumbuhan nasional dalam tiga hal: populasi, penggunaan sumber kapital, dan kemajuan teknologi. Mereka berargumen bahwa seiring meningkatnya ketiga hal tersebut, maka kecenderungan sebuah masyarakat untuk meningkatkan aktifitas di luar batas lingkungannya akan semakin meningkat pula. Di waktu yang bersamaan kemampuan mereka untuk ekspansi juga semakin meningkat. Meningkatnya aktifitas tersebut memang tidak selalu bersifat konfliktual (beberapa kebutuhan masyarakat maju dipenuhi melalui aktifitas perdagangan, investasi, dan kerjasama lainnya) namun selalu ada kemungkinan bagi kepentingan dan aktifitas dari negara maju yang memicu konflik langsung. Kerjasama perdagangan bahkan tidak selalau berjalan damai. Meningkatnya hubungan ekonomi bisa juga melahirkan ketegangan politik serta menjadi bibit perlombaan senjata, sebagaimana yang terjadi antara Inggris dan Belanda di abad ke-18, atau Jepang dan AS di tahun 1930-an. Maka bagi Courcri dan North, sektor ekonomi menjadi faktor yang cukup penting dalam hubungan keamanan internasional.

Meningkatnya populasi, pemanfaatan pendapatan, sumberdaya dan teknologi, dalam pandangan Courcri dan North, sesungguhnya cenderung mendorong setiap negara untuk meningkatkan hubungan satu sama lain. Kelangkaan akan sumberdaya alam dan kebutuhan akan pasar menjadikan hubungan antara negara bersifat kompetitif. Dan ketika situasi tersebut sampai pada level kompetisi dan bahkan

⁷ Geoffrey Blainey. 1988. *The Causes of War* (3rd edn). New York: The Free Press.

⁸ Nazli Courcri & Robert C. North. 1975. *Multinational Corporations and International Trade*. New York: Basic Books.

memanas, negara menemukan kondisi di mana hal tersebut mampu mempengaruhi perilaku mereka sekaligus menyediakan mereka dengan kemampuan yang bisa melibatkan mereka dalam konflik senjata. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak serta merta bisa menghindarkan terjadinya konflik senjata antar negara, justru dengan mudah menciptakan kondisi berbahaya bagi semua.

Kedua, pendapat yang diwakilkan oleh teori *Power Transition* yang dikemukakan A.F.K. Organski dan muridnya Jacek Kugler.⁹ Pendapat yang sama namun sedikit dikembangkan juga bisa ditemukan dalam argumen Robert Gilpin melalui *War and Change*.¹⁰ Teori *Power Transition* memfokuskan pada *great powers*, dan mencoba memahami akar dari perang antara negara-negara kekuatan besar. Pertumbuhan ekonomi dan kekuatan besar yang dimiliki oleh negara kuat serta munculnya penantang di sisi lain menjadi kunci utama. Kepentingan antara dua negara kuat tersebut memunculkan potensi konflik, karena beberapa negara dengan kekuatan menengah, misalnya, akan mendukung status quo, sementara yang lain mencari kesempatan dengan mendukung munculnya kekuatan baru. Dengan perbedaan ekonomi dan militer antara keduanya yang semakin tipis, situasi seperti ini biasanya menciptakan kondisi di mana satu negara ingin menyaingi dan mengalahkan yang lain. Hubungan keaman antara keduanya pun menjadi memanas dan dengan mudah menguap dan tidak jarang berakhir dengan perang. Bagi teori *Power Transition*, pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi kunci, sekaligus mendorong munculnya konflik. Karena itu penting untuk memperhatikan dua kekuatan spesifik untuk menaksir situasi keamanan global.

Teori yang lebih detail dan menarik lainnya adalah teori *Power Cycle* yang dikemukakan Charles Doran. Sebagaimana teori *Power Transition*, Doran melihat pada sub-sistem dari kekuatan besar. Namun di sini Doran melihat tidak hanya dua kekuatan besar yang bermain dan yang saling bersaing. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di antara kekuatan-kekuatan besar tersebut menjadi faktor pemicu, baik dinamika ataupun bahaya dari hubungan keamanan global.¹¹

⁹ Lihat A.F.K. Organski. 1958. *World Politics*. New York: Basic Books; A.F.K. Organski & Jacek Kugler. 1983. *The War Ledger*. Chicago: University of Chicago Press.

¹⁰ Robert Gilpin. 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹¹ Charles Doran & Wes Parsons. 1980. "War and the Cycle of Relative Power." *American Political Science Review*, 74. hal. 947-965.

Selain itu, hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan pun tidak serta merta mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, bahkan tidak sedikit yang bersifat eksploitatif. Pada kondisi ini, potensi konflik akan muncul. Karena itu, tidak selamanya tesis kaum ekonomi liberal yang menjelaskan bahwa “*trade brings peace*,” berjalan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun terdapat beberapa studi empiris yang membuktikan hal tersebut, namun konflik terbuka akibat praktik kerjasama ekonomi dan perdagangan juga bisa menimbulkan konflik terbuka antar negara.¹² Atau perhatian akan keamanan akan muncul di saat sebuah negara merasa terlalu bergantung kepada pihak atau negara tertentu (seperti yang ditunjukkan oleh presiden Bush yang memperlihatkan ketergantungan AS terhadap minyak di Timur Tengah). Penelitian yang dilakukan Katherine Barbieri menunjukkan bahwa dalam hubungan perdagangan bilateral justru memunculkan potensi konflik daripada penghambat konflik, sebagaimana yang diklaim oleh kaum liberal.¹³

Karena itu, dengan kajian teoritik ini, kita punya alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kondisi ekonomi di antara setiap negara, perbedaan pertumbuhan di antara mereka, kerjasama ekonomi yang mereka bangun, turut memberikan pengaruh terhadap hubungan keamanan, terutama meningkatnya ancaman keamanan tradisional melalui peningkatan kekuatan militer dan potensi konflik terbuka.

Perlombaan Senjata: Peningkatan Anggaran Militer dan Supremasi Politik

Negara-negara yang menikmati kemajuan ekonomi secara signifikan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkatkan anggaran keamanan serta kemampuan militernya. Hal ini didorong oleh dua faktor: (a) untuk mengimbangi kemajuan ekonominya, sekaligus memastikan proteksi terhadap sektor industri, baik yang adad di dalam maupun di luar negeri; (b) upaya menunjukkan supremasi politik, baik di lingkungan kawasan ataupun global.

Menurut Blainey, negara yang semakin maju secara ekonomi akan cenderung meningkatkan belanja militernya seiring waktu.¹⁴ Fenomena ini tentu saja berdampak

¹² Lihat Solomon W. Polacek. 1980. “Conflict and Trade.” *Journal of Conflict Resolution*, 24. hal. 55–78.

¹³ Lihat Katherine Barbieri. 2002. *The Liberal Effect: Trade, Peace, and Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

kurang positif terhadap hubungan keamanan, di mana peningkatan kemampuan terhadap kemampuan militer dan persenjataan tersebut akan membentuk *mind-set* yang akan mendorong para pemimpin negara untuk menggunakan potensi dan kekuatan yang diakumulasi selama ini. Selain itu, peningkatan anggaran dan kekuatan militer oleh satu negara akan memicu peningkatan yang sama oleh negara lainnya, yang tentu saja bisa berujung pada perlombaan senjata—bahkan konflik terbuka. Tidak hanya antara dua negara yang berdampingan tetapi bisa meluas ke regional, bahkan internasional.¹⁵ Dalam sejarah politik internasional hal ini pernah terjadi di era Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Kini fenomena yang sama muncul di level lebih yang lebih rendah yakni regional, seperti yang terjadi antara Yunani dan Turki, India dan Pakistan, Cina dan Taiwan, atau antara dua Korea: Utara dan Selatan.

Di kawasan Aisa (serta Asia Tenggara), fenomena yang sama mulai tampak dalam sepuluh tahun terakhir: negara-negara di kawasan ini beramai-ramai meningkatkan anggaran pertahanannya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi beberapa negara di kawasan ini yang mengalami kemajuan ekonomi cukup mengesankan, sehingga memungkinkan bagi peningkatan anggaran keamanan. Bahkan di beberapa negara, anggaran keamanan meningkat sangat signifikan. Kondisi ini baru terjadi dalam satu dekade terakhir seiring pencapaian ekonomi oleh beberapa negara di kawasan dalam spektrum yang sangat positif.

Dalam hal ini Cina menjadi contoh yang paling mengkhawatirkan. Kemajuan ekonominya yang sangat mengesankan (bahkan kekuatan ekonomi Cina kini nomor dua di dunia setelah AS) membuatnya bisa melakukan apa saja. Dengan cadangan devisa US\$ 3.000 trilyun, membeli persenjataan modern bukanlah persoalan sulit bagi Cina. Selain itu, dengan wilayah paling luas di benua Asia, Cina tentu memiliki alasan yang kuat untuk mengembangkan persenjataannya. Karena itu tak heran jika Cina menjadi negara yang paling royal meningkatkan anggaran pertahanannya dalam sepuluh tahun terakhir: 85 persen. Setiap tahunnya Cina menghabiskan anggaran sekitar 70-150 milyar dolar AS, membuatnya berada di posisi kedua setelah AS,

¹⁵ Lihat D.M. Gibler, T.J. Rider, M. Hutchison. 2005. "Taking arms against a sea of troubles: Conventional arms races during periods of duopoly." *Journal of Peace Research* 42, hal. 121-149.

yang pada tahun 2009 lalu menghabiskan anggaran sebesar 738 milyar dolar.¹⁶ Alasan Cina cukup jelas, di satu sisi sebagai upaya melindungi kepentingan ekonominya, di sisi lain untuk menunjukkan supremasi politik, baik di kawasan maupun dunia internasional.¹⁷

Bagi struktur keamanan kawasan, langkah Cina ini tentu saja menebar ancaman bagi negara- lain di sekitarnya. Hal ini kemudian mendorong negara-negara yang terlibat untuk melakukan pembenahan di bidang pertahanan dan keamanan. Mereka berlomba-lomba menyiangi lumbung senjata, lalu berupaya mengisinya dengan peralatan baru. Memang, peningkatan anggaran pertahan di kawasan Asia tidak selalu dipicu oleh aktifitas keamann yang dilakukan Cina, namun paling tidak kebijakan negara ini semakin menaikkan suhu politik di kawasan. Korea Selatan, misalnya, dalam periode yang sama mulai berbenah dengan meningkatkan pos keamanan hingga 25 persen. Sementara India menambah alokasi sebesar 46 persen. Jepang bahkan dengan tegas melihat ancaman Cina tersebut. Dalam buku putih yang dikeluarkan Departememn Pertahan Jepang, September 2010, sebanyak 19 halaman diisi dengan imbauan untuk memperhatikan aktifitas militer Cina, yang dalam beberapa manuvernya dilakukan di lokasi perairan Jepang.

Fenomena yang sama juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi yang mulai dinikmati oleh beberapa negara di kawasan ini turut mendorong peningkatan belanja militer—setidaknya dalam delapan tahun terakhir. Belanja militer Malaysia, misalnya, meningkat dua kali lipat dari 1,7 milyar dolar AS di tahun 2000 menjadi 3,5 milyar dolar di tahun 2008. Pada periode yang sama Singapura naik 26 persen, dari 4,6 milyar ke 5,8 milyar. Sementara peningkatan sangat signifikan dilakukan Indonesia dengan 27 persen, yakni dari 2,2 milyar hingga mencapai 3,8 milyar dolar. Rata-rata peningkatan belanja militer negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2000 hingga 2008 naik sekitar 50 persen. Peningkatan tersebut ditujukan untuk memperbesar kapasitas proyeksi kekuatan militer di luar batas negara.¹⁸

¹⁶ Data-data penting terkait peningkatan anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia yang ada di bagian ini dikutip dari laporan majalah *Gatra* Edisi 18-24 Oktober 2010. "Sang Naga Memicu Perlombaan Senjata Asia." hal. 28-31.

¹⁷ Lihat Michael Backman. 2008. *Asia Future Shock*. Jakarta: Ufuk Press. hal. 35-49.

¹⁸ Data-data ini dikutip dari tulisan Andi Widjanto, "Dinamika Demokrasi di Asia Tenggara"

Menurut Gibler, perlombaan senjata dimaknai sebagai kasus di mana kedua negara meningkatkan anggaran militernya ataupun personelnya sebanyak 8 persen atau lebih setiap tahunnya selama periode tiga tahun, dan terdapat bukti kualitatif historis di mana hal ini mendorong dinamika kompetisi antara rival.¹⁹ Perlombaan senjata (*arms race*) memang belum terjadi sepenuhnya baik di kawasan Asia ataupun Asia Tenggara, mengingat aktifitas tersebut belum mencapai 8 persen tiap tahunnya, namun pola peningkatan anggaran pertahanan yang terjadi dalam satu dekade terakhir menunjukkan indikasi yang sangat mengkhawatirkan, terlebih secara historis kawasan Asia (terutama Asia Timur dan Selatan) terbilang konfliktual.

Begitu pula yang terjadi di kawasan Asia Tenggara: belum sampai pada tingkat perlombaan senjata yang dapat mengancam stabilitas regional. Namun perlu diingat, sebagaimana yang dikemukakan Richard A. Bitzinger, bahwa hal ini semata-mata lebih dikarenakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki keterbatasan anggaran pertahanan.²⁰ Tidak sulit untuk membayangkan, jika kemajuan ekonomi terus meningkat pesat di kawasan ini, maka tidak menutup kemungkinan anggaran pertahanan beberapa negara pun akan meningkat hingga pada angka yang cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas politik di kawasan. Selain itu, secara historis, ketegangan diplomatik antara beberapa negara di kawasan ini, seperti Indonesia-Malaysia, Malaysia-Singapura, ataupun Thailand-Kamboja, menjadi catatan tersendiri.

Friski Politik dalam Relasi Ekonomi Antar Negara

Salah satu aspek paling penting dari globalisasi adalah semakin meningkatnya hubungan ekonomi antar negara pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teori Hubungan Internasional sedikit menjanjikan dalam menjelaskan hubungan ekonomi antar negara serta kemungkinan dampaknya terhadap konflik. Ketika terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak, maka bisa dipastikan segala sesuatu yang bisa mengancam pertukaran tersebut—seperti konflik senjata—akan ditentang secara bersama.²¹ Karena itu, perdagangan ataupun aktifitas apapun yang mendatangkan keuntungan antara dua belah pihak akan menciptakan

¹⁹ D.M. Gibler, T.J. Rider, M. Hutchison. *Ibid.*

²⁰ Richard A. Bitzinger. 2010. *A New Arms Race? Explaining Resent Southeast Asia Military Acquisitions*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

²¹ Solomon M. Dolowitz. 1990. 'Conflict and Trade', *Journal of Conflict Resolution*, 34, hal. 55-70.

“kepentingan bersama untuk damai” di antara anggota kelompok masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari aktifitas tersebut.²² Dengan jumlah pertukaran ekonomi global yang semakin meningkat, seharusnya beberapa negara berusaha menentang penggunaan kekuatan senjata dalam menyelesaikan pertikaian yang muncul. Namun demikian, membayangkan bahwa dampak positif tersebut akan berlaku universal tentu sebuah sikap yang terlalu optimis. Klaim kaum liberal bahwa “*trade brings peace*,” menurut Stephen Brooks tidak sepenuhnya berlaku karena dampaknya yang sangat terbatas.²³

Dalam melihat potensi konflik yang ditimbulkan dari hubungan kerjasama ekonomi antar negara, bisa dilihat dari dua pola: Pertama, sebagaimana yang ditunjukkan Katherine Barbieri dalam bukunya, *The Liberal Illusion* (2002), bahwa perdagangan juga menciptakan potensi konflik terutama ketika hubungan tersebut menciptakan ketergantungan yang dampaknya bisa memunculkan sikap marah dan penentangan.²⁴ Sementara Håvard Hegre menunjukkan bukti yang cukup solid bahwa dampak perdagangan yang diklaim bisa meredakan ketegangan sangat terbatas terutama di negara-negara maju dan industrial.²⁵ Kenyataannya, ia melihat perdagangan justru bisa memunculkan potensi konflik di antara negara-negara kurang maju (*Lesser Developed Countries*).

Kedua, perdagangan tidak selalu terjadi dalam hubungan yang saling menguntungkan. Bahkan tidak sedikit yang bersifat eksploitatif. Praktik seperti ini dengan mudah menimbulkan perlawanan dari negara-negara yang merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus di Amerika Latin sekitar tahun 1980-an ketika penetrasi ekonomi AS begitu kuat melalui lembaga keuangan internasional IMF. Bahkan dampak dari praktik ketidakimbangan hubungan ekonomi tersebut berlanjut hingga kini, di mana kebencian terhadap AS masih begitu kuat. Terlebih dengan naiknya beberapa pemimpin berhaluan radikal-kiri seperti di Bolivia, Venezuela, ataupun Meksiko. Hal yang sama juga terjadi di

²² Ruth Arad, Seev Hirsch & Alfred Tovias. 1983. *The Economics of Peacemaking: Focus on the Egyptian-Israeli Situation*. London: Macmillan for the Trade Policy Research Center.

²³ Stephen G. Brooks. 2005. *Producing Security: Multinational Corporations, Globalization, and the Changing Calculus of Conflict*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

²⁴ Katherine Barbieri. *Ibid.*

²⁵ Håvard Hegre. 2000. "Development and the Liberal Peace: What Does it Take to be a Trading

beberapa negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, atas eksploitasi ekonomi negara-negara maju.

Selain itu, stagnasi dan kemunduran ekonomi, serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin, perlu dimasukkan dalam argumen yang kurang optimis melihat kemungkinan berkurangnya konflik antar negara. Selama periode kemunduran ekonomi, kebanyakan negara cenderung menahan diri dari konflik senjata, jika hanya dilihat dari faktor biaya militer yang sulit pada periode tersebut. Namun terdapat beberapa keadaan tertentu di mana semakin frustrasi seorang pemimpin maka akan semakin kuat pula upaya memilih jalan konflik untuk mencapai *power*. Dalam hal ini kasus penyerangan Korea Utara ke pulau Yeonpyeong, Korea Selatan, tahun 2010, bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Walaupun aksi tersebut tidak sepenuhnya berlatar belakang ekonomi, namun bisa dimaklumi bagaimana frustasinya negara tersebut mengingat selama bertahun-tahun cukup terisolasi dari katifitas ekonomi global, sehingga kemajuan ekonomi dan kesejahteraan menjadi sesuatu yang langka.

Aktor Baru dan Perluasan Industri Senjata

Globalisasi membawa perubahan signifikan bagi kemajuan ekonomi secara global. Peningkatan volume produksi dan transaksi perdagangan, hingga kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan semua pihak saling terhubung dan mengambil bagian, semakin memperluas jangkauan distribusi kapital dan tidak lagi didominasi oleh negara-negara maju. Selain itu, globalisasi memberi ruang yang besar bagi keterlibatan aktor-aktor selain negara. Jika sebelumnya perdagangan global menjadi domain dari negara, maka kini aktor-aktor seperti individu, kelompok individu, NGOs, dan MNCs, memiliki peran yang cukup penting. Bahkan kini posisi mereka lebih dominan dalam aktifitas ekonomi global. Memang MNCs telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi global sejak beberapa dekade, namun kemajuan yang dicapai baik dalam hal jumlah ataupun kemampuan seperti yang tampak sekarang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bisa dibayangkan kemajuan ekonomi secara global turut ditopang oleh aktifitas aktor-aktor non-negara tersebut. MNCs, misalnya, dengan sumber kapital yang sangat besar serta jaringan transnasional yang luas, membuat posisinya sangat penting dalam ekonomi global. Sektor-sektor industri yang berorientasi ekspor dinamis di

negara berkembang bahkan didominasi oleh MNCs. Di Indonesia kita bisa melihat dengan jelas bagaimana luasnya kiprah MNCs seperti Unilever, McDonald, Toyota, Freeport, Newmont, ataupun Exxon.

Munculnya aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional tidak hanya memberi dampak pada kemajuan ekonomi sebuah negara, tetapi juga sektor keamanan. Meningkatnya jumlah aktor dalam hubungan internasional sekaligus menjadikan persoalan keamanan semakin rumit, mengingat aktor-aktor ini juga memiliki kekuatan yang tak kalah besar dari aktor negara. Peningkatan ancaman keamanan yang disebabkan munculnya aktor-aktor baru ini bisa dilihat dalam tiga hal: Pertama, MNCs yang bergerak di bidang persenjataan kini semakin maju dalam hal teknologi produksi dan peningkatan jumlah produksi secara global. Hal ini sekaligus menuntut adanya perluasan pasar. Globalisasi memberi kemudahan bagi semua pihak dalam mengakses senjata di pasar global.

Kedua, globalisasi dan transfer teknologi memungkinkan industri-industri persenjataan lokal berkembang sehingga mampu meningkatkan produksi senjata dalam negeri dan tidak lagi bergantung pada pasokan negara maju, apalagi hanya dari satu sumber saja. Ketiga, MNCs dan perusahaan besar lainnya memiliki modal besar dalam mengembangkan senjata. Sumber daya dan jumlah kapital yang besar membuat mereka mampu mempengaruhi kebijakan keamanan sebuah negara.

Industri Senjata: Peningkatan Produksi dan Ekspor

Globalisasi industri senjata ini membawa perubahan signifikan pada industri secara tradisional: dari pola produksi hingga pemasaran, di mana kini lebih banyak berorientasi internasional. Karena itu kini kualitas produkis dan transaksi senjata pun bertambah secara signifikan. Walaupun secara umum produksi persenjataan mungkin menurun, namun perproduksi persenjataan multinasional justru semakin meningkat. Begitu pula dalam hal jumlah ekspor dan impor. Hal ini dikarenakan teknologi produksi terus berkembang dan didukung oleh jaringan transnasional.²⁶

²⁶ Lihat Brian M. Pollins. 2009. "Globalization and Armed Conflict Among nations" dalam

Perubahan industri senjata global ini tidak terlepas dari perubahan proses industri secara umum. Di mana perusahaan-perusahaan kini semakin meningkatkan jumlah produksi dengan kualitas yang tetap sama namun dengan harga yang murah. Salah satu caranya adalah memperluas area produksi ke beberapa negara oleh perusahaan yang sama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ongkos produksi dengan upah pekerja yang kompetitif dan sumber bahan baku yang murah. Karena itu, kini banyak perusahaan telah mengubah proses produksi mereka sehingga produksi barang setiap harinya terdiri dari komponen-komponen yang dihasilkan dari beberapa negara namun dari divisi-divisi perusahaan yang sama. Dengan kata lain, produksi senjata dan keperluan militer lainnya sebenarnya dimiliki dan dioperasikan oleh satu perusahaan, namun melibatkan proses lintas negara, bahkan lintas benua. Proses produksi semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam hal ini membuat koneksi ekonomi antar negara semakin erat dan terikat. Perdagangan internasional kini tidak lagi melulu berlangsung dalam skema pertukaran independen yang berbasiskan pasar negara berdaulat sebagaimana yang terjadi pada periode David Ricardo.

Perubahan yang terjadi di sektor keamanan dengan menguatnya industri persenjataan, proses produksi, serta interdependensi, memiliki implikasi keamanan yang juga cukup mengkhawatirkan bagi hubungan antar negara. Stephen Brooks (2005) berargumen bahwa dampak dari globalisasi proses produksi seharusnya semakin mendorong hubungan yang harmonis dan damai antara negara-negara maju, terutama melalui ekonomi pasar. Namun demikian tampaknya ia cukup pesimis melihat dampaknya terhadap negara-negara berkembang.²⁷ Setidaknya dampak keamaan dari meningkatnya industri persenjataan secara global bagi hubungan antar negara bisa dilihat dalam tiga hal: Pertama, meningkatnya jumlah produksi senjata akan diiringi oleh keperluan terhadap pasar, dan dalam hal ini negara-negara berkembang merupakan pasar yang menjanjikan—baik negara yang mulai merasakan kemajuan ekonomi, ataupun negara yang memiliki potensi konflik lebih besar.

Kedua, globalisasi memberi kemudahan bagi semua pihak, termasuk aktor non-negara seperti individu, kelompok, ataupun NGOs. Dari NGO sejenis Food for

²⁷ Stephen G. Brooks. *Op. cit.*

Peace, the Open Society Institute, hingga ke organisasi radikal seperti Al Qaeda.²⁸ Keterlibatan aktor-aktor non-negara ini memberikan dampak langsung terhadap keamanan nasional, mengingat aktifitas mereka tidak selalu berdampak positif bagi kedaulatan. Kelompok-kelompok mafia ataupun terorisme, misalnya, semakin memperluas bentuk ancaman. Dan hal ini sangat terkait keamanan tradisional, mengingat ancaman yang hadir tidak selalu ditujukan kepada individu lain ataupun kelompok individu, melainkan juga kedaulatan negara. Kasus invasi AS ke Afganistan tahun 2001, misalnya, bisa dilihat dari sudut pandang ini, di mana aksi sporadis AS awalnya dipicu oleh serangan sekelompok teroris terhadap gedung World Trade Centre. Implikasinya tidak sederhana, karena melibatkan dua negara: AS dan Afganistan. Invasi AS bahkan turut mengintervensi kedaulatan Afganistan dengan ikut menggulingkan pemerintahan Taliban serta mengorbankan banyak warga sipil.

Ketiga, menguatnya MNCs di sektor industri senjata memberikan modal yang besar bagi aktor ini untuk mempengaruhi kebijakan sebuah negara, terutama dalam bentuk regulasi yang semakin menyuburkan industri senjata global. Hal ini bisa kita lihat dari fenomena industri senjata di AS. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa industri senjata AS merupakan yang paling maju. Beberapa MNCs mereka bahkan menguasai pasar senjata dunia. Karena itu MNCs ini sangat berkepentingan terhadap setiap kebijakan luar negeri AS, terutama kebijakan yang ditujukan kepada negara-negara berkembang yang sarat konflik. Walaupun keterlibatan langsung MNCs terhadap kebijakan pemerintah AS masih perlu dibuktikan melalui riset lebih lanjut, namun dukungan yang diberikan oleh berbagai perusahaan senjata terhadap dua partai politik terbesar di AS, terutama Partai Republik, menunjukkan indikasi yang cukup jelas.

Geliat Industri Senjata Dalam Negeri

Perubahan industri persenjataan global tidak hanya ditandai oleh peningkatan jumlah dan perluasan jaringan produksi, tetapi juga transfer teknologi ke negara-negara yang sebelumnya hanya menjadi konsumen. Transfer teknologi dan

²⁸ Brian M. Pollins. *Ibid.*

keterhubungan antara negara memunculkan konsekuensi keamanan yang baru. Jika dulu negara-negara berkembang sangat tergantung terhadap suplai dari negara maju, maka kini ketergantungan tersebut mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena negara-negara berkembang—walaupun tidak semua—mulai mampu mencapai kemajuan sendiri di bidang keamanan.

Globalisasi dan transfer teknologi memungkinkan negara-negara berkembang bisa memproduksi senjata sendiri. Hal ini tidak terlepas dari geliat industri senjata domestik yang didukung oleh perusahaan-perusahaan lokal ataupun nasional. Hal ini tentu saja berdampak pada perluasan area produksi senjata. Kini suplai senjata tidak lagi didominasi oleh satu atau dua negara maju saja. Dengan adanya transfer teknologi, dan kemajuan ekonomi secara nasional, membuat beberapa negara berkembang mulai mampu memproduksi senjata sendiri, seperti yang terjadi di Israel, Brazil, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Taiwan. Bahkan negara-negara yang dulunya hanya berstatus pengimpor kini sudah mampu mengekspor ke negara lain, terutama Israel dan Brazil.²⁹

Sudah menjadi kenyataan bahwa saat ini merupakan era kebangkitan beberapa negara dunia ketiga. Kita mulai melihat bagaimana negara-negara seperti Cina, Brazil, India, ataupun Indonesia, mulai menjadi pemain *major* dalam ekonomi (politik) global. Distribusi *power* pun kini semakin meluas dan memunculkan pemain-pemain yang amat disegani, yang dalam duapuluh tahun terakhir masih berbenah.

Kombinasi dari kemampuan ekonomi nasional serta meningkatnya kemampuan industri persenjataan dalam negeri berdampak langsung terhadap hubungan keamanan internasional, terutama upaya sebuah negara dalam meningkatkan kekuatan militernya. Perlu dicatat bahwa perlombaan senjata tidak hanya dipicu oleh adanya perluasan volume dan tingkat produksi perusahaan-perusahaan dari luar. Industri militer dalam negeri juga memberikan sumbangsih penting. Banyaknya negara di Asia yang tidak lagi tergantung pada industri militer AS ataupun Rusia, misalnya, menunjukkan signifikannya peran industri keamanan dalam negeri.

Kesimpulan

Globalisasi, melalui relasi ekonomi-politik yang dibangun, pada kenyataannya tidak hanya menghadirkan harapan akan kemajuan melainkan juga dampak yang cukup kompleks dan turut mendorong menguatnya ancaman keamanan tradisional, di mana kedaulatan dan *survival* negara menjadi persoalan yang kembali dianggap penting dewasa ini. Adalah kemajuan ekonomi sebuah negara yang mendorong hal tersebut, di mana negara-negara yang menikmati keuntungan ekonomi secara signifikan semakin mendominasi hubungan keamanan internasional, terutama dengan meningkatkan anggaran pertahannya. Potensi perlombaan senjata antar negara ini, baik di ranah regional maupun internasional, turut dikung oleh meningkatnya kualitas industri senjata global melalui peran aktor-aktor baru seperti MNCs, serta geliat industri dalam negeri yang memungkinkan negara-negara yang sebelumnya lebih banyak mengimpor mulai melepaskan ketergantungan mereka terhadap pasokan senjata negara maju.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa kemajuan ekonomi yang dicapai secara signifikan oleh banyak negara di era globalisasi ini, justru turut berkontribusi pada meningkatnya ancaman konflik terbuka. Karena itu alih-alih memberikan dampak positif bagi berkurangnya ancaman konflik terbuka secara langsung, seperti tesis para kelompok liberal bahwa keterhubungan dan kemajuan ekonomi akan mengurangi potensi konflik, globalisasi justru turut meningkatkan potensi ancaman langsung terhadap eksistensi dan kedaulatan negara. Peningkatan anggaran keamanan yang berlangsung di beberapa negara Asia dalam sepuluh tahun terakhir, menguatnya aktor seperti MNCs dalam mendorong industri senjata secara global, serta geliat industri senjata domestik dalam spektrum yang menjanjikan, merupakan indikasi nyata akan menguatnya ancaman tersebut.

Bibliografi

- Anwari, Tatang M. 1996. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arad, Ruth, Seev Hirsch & Alfred Tovias. 1983. *The Economics of Peacemaking: Focus on the Egyptian-Israeli Situation*. London: Macmillan for the Trade Policy Research Center.
- Backman, Michael. 2008. *Asia Future Shock*. Jakarta: Ufuk Press.
- Barbieri, Katherine. 2002. *The Liberal Illusion: Does Trade Promote Peace?* Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Baylis, John & Steve Smith. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK: Oxford University Press.
- Bitzinger, Richard A. 1994. "The Globalization of the Arms Industry." *International Security*, Vol. 19 No. 2. hlm. 170-198.
- Bitzinger, Richard A. 2010. *A New Arms Race? Explaining Resent Southeast Asia Military Acquisitions*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Blainey, Geoffrey. 1988. *The Causes of War* (3rd edn). New York: The Free Press.
- Brooks, Stephen G. 2005. *Producing Security: Multinational Corporations, Globalization, and the Changing Calculus of Conflict*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Buzan, Barry. 1991. *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Choucri, Nazli & Robert C. North. 1975. *Nations in Conflict: National Growth and International Violence*. San Francisco: W.H. Freeman.
- Doran, Charles & Wes Parsons. 1980. "War and the Cycle of Relative Power." *American Political Science Review*, 74. hlm. 947-965.
- Friedman, Thomas L. 2005. *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*, New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Penguin Books.
- Gatra Edisi 18-24 Oktober 2010. "Sang Naga Memicu Perlombaan Senjata Asia". hlm. 28-31.
- Gibler, D.M., T.J. Rider, M. Hutchison. 2005. "Taking arms against a sea of troubles: Conventional arms races during periods of rivalry." *Journal of Peace Research* 42. hlm. 131-148.
- Gilpin, Robert. 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guay, Terrence R. 2007. *Globalization and Its Implications for the Defense Industrial Base*. (Online), (<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB756.pdf> diakses 5 Mei 2013).
- Hegre, Håvard. 2000. "Development and the Liberal Peace: What Does it Take to be a Trading State?", *Journal of Peace Research*, 37. hlm. 5-30.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- International Monetary Fund. 1997. *World Economic Outlook*. May, hlm. 45.
- Nazir, Noh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Organski, A.F.K. & Jacek Kugler. 1983. *The War Ledger*. Chicago: University of Chicago Press.
- Organski, A.F.K. 1958. *World Politics*. New York: Basic Books.
- Polacek, Solomon W. 1980. "Conflict and Trade", *Journal of Conflict Resolution*, 24: hlm. 55-78.
- Pollins, Brian M. 2009. "Globalization and Armed Conflict Among nations." dalam Geoffrey Emrys Chew Till & Joshua Ho. *Globalization and Defence in the Asia-Pacific: Arms across Asia*. London and New York: Routledge.

Widjajanto, Andi. 2010. "Dinamika Persenjataan di Asia Tenggara." *Gatra*, Edisi 18-24 Oktober.

World Trade Organization. "Selected Long-Term Trends." *International Trade Statistics 2005*. (Online), (www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_e/its06_longterm_e.pdf diakses 10 Juni 2013).

World Trade Organization. "Selected Long-Term Trends." *International Trade Statistics 2005*. Tersedia dalam www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_e/its06_longterm_e.pdf diakses 10 Juni 2013.